



## PENGARUH SISTEM PELAPORAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LENGKONG, KECAMATAN BOJONGSOANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Neneng Kartini

Universitas Teknologi Digital

E-mail: [neneng10219040@digitechuniversity.ac.id](mailto:neneng10219040@digitechuniversity.ac.id)

### ABSTRACT

*By using a descriptive quantitative research approach, this study intends to determine the effect of the Reporting System and Internal Control on the Transparency of Village Fund Management in Lengkong Village, Bojongsoang District. Multiple linear regression analysis was used to analyze the data in this study. According to research findings, the Reporting System has no statistically significant effect, with the t-test results of 0.112 and sig. 0.605 > = 0.05. This has provided evidence that financial reporting in Lengkong Village is in accordance with siskeudes rules, while Internal Control has a major effect on Transparency in Village Fund Management, with t test results of 0.385 and sig. 0.001 = 0.05. It is understandable that internal control is improving.*

**Keywords:** Reporting System, Internal Control, Transparency, Village Fund Management.

### ABSTRAK

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh Sistem Pelaporan dan Pengendalian Intern terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Menurut temuan penelitian, Sistem Pelaporan tidak berpengaruh signifikan secara statistik, dengan hasil uji t sebesar 0,112 dan sig. 0,605 > = 0,05. Hal ini telah memberikan bukti bahwa pelaporan keuangan di Desa Lengkong telah sesuai dengan aturan siskeudes, sedangkan Pengendalian Intern berpengaruh besar terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa, dengan hasil uji t sebesar 0,385 dan sig. 0,001 = 0,05. Hal ini dapat dipahami bahwa pengendalian internal membaik.

**Kata Kunci :** Sistem Pelaporan, Pengendalian Internal, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

### PENDAHULUAN

Karena sifat pedesaan dari sebagian besar daratan Indonesia, maka desa adalah salah satu bentuk pemerintahan daerah yang bekerja sama dengan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat yang sah dengan batas wilayah yang berwenang untuk menguasai dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam masyarakat. susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memajukan ekonomi lokal, mengembangkan setiap desa, dan meningkatkan taraf hidup warga, desa memiliki kekuatan untuk mengontrol dan mengelola pemerintahannya sendiri. Sumber pendapatan desa diperlukan untuk memenuhi kewenangan, kewajiban, tugas desa dalam pemerintahan dan pembangunan.

Kemampuan pemerintah desa untuk mengurus, mengendalikan, dan menjalankan rumah itu sendiri, bersama dengan tanggung jawab dan kewajiban masyarakat, akan tumbuh seiring dengan pelaksanaan otonomi. Meskipun demikian, tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan ini tetap ada. Menjaga keterbukaan dalam penanganan dana desa memerlukan sistem pelaporan dan pengawasan internal. Wabah COVID-19 berdampak luas terhadap perekonomian Indonesia, tidak terkecuali Desa Lengkong. Perlambatan pembangunan ekonomi dan munculnya aturan yang memaksa penundaan inisiatif tertentu adalah konsekuensinya. Pemerintah Desa Lengkong harus membangun sistem pelaporan dan pengawasan yang benar agar tercipta transparansi karena dikhawatirkan masyarakat akan menganggap dana desa sering digunakan untuk barang-barang yang dianggap kurang berharga. Menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur/bupati/walikota bertugas mengawasi pelaksanaan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

### **Pengelolaan keuangan**

Perencanaan, penganggaran, administrasi usaha, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan semuanya dianggap sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa (Utami, 2017). Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Transfer Dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara desa dan desa adat. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Ini harus memotivasi semua pihak untuk mendukung kepala desa dalam mengawasi atau setidaknya mengelola sumber daya keuangan mereka. Alokasi Dana Desa Gagasan membangun desa sangat erat kaitannya dengan perencanaan, yaitu berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa. Gagasan Perencanaan desa mengharuskan masyarakat untuk berkonsultasi dengan rencana pembangunan kabupaten/kota saat mengambil keputusan pembangunan. Pasal 79 dan 80 UU No 6 Tahun 2014 mengatur hal tersebut.

### **Sistem Pelaporan**

Untuk mengawasi seberapa baik manajer berpegang teguh pada anggaran yang Anda tetapkan untuk mereka, Anda memerlukan sistem pelaporan yang andal (Afifah & Azwari, 2015). Agar sebuah laporan dianggap kredibel, penulisnya harus bertindak secara terbuka, jujur, dan tidak memihak. Pemerintah desa, dalam perannya sebagai pengelola dana desa, bertanggung jawab untuk memastikan warga memiliki akses terhadap informasi keuangan yang andal, terkini, relevan, konsisten, dan dapat dipercaya (Triyono et al, 2019).

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab, hak, dan kewajibannya sebagai kepala desa, seseorang harus: Mengirimkan laporan pelaksanaan APBD kepada bupati atau walikota dengan format sebagai berikut: Setiap akhir tahun anggaran menyampaikan Laporan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada bupati atau walikota.

Pada akhir masa jabatan, menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota. Pada akhir setiap tahun anggaran, memberikan laporan tertulis kepada BPD tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mewajibkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya, termasuk Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda, untuk meningkatkan transparansi dalam proses pembangunan desa, tetap menjaga tab tentang keuangan desa. BPKP membuat Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2015 dengan tujuan sebagai berikut: memastikan bahwa semua peraturan dan kebijakan dalam pelaksanaan UU Desa, khususnya yang berkaitan dengan keuangan dan pembangunan desa, dilaksanakan dengan benar di semua tingkat pemerintah.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 Tahun 2010 tentang atribut kualitatif laporan keuangan merupakan langkah normatif yang perlu diwujudkan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, termasuk laporan keuangan yang harus Relevan, Reliable, Comparable, dan Understanding. di dalam data akuntansi. Pengelolaan keuangan yang dibuat dan dikembangkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SPAP) menghasilkan laporan yang berkualitas. Laporan keuangan dianggap berkualitas tinggi jika diserahkan tepat waktu, tetapi laporan tersebut juga memiliki beberapa tujuan lain, seperti meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang menjalankan tugas mereka dan mengungkapkan operasi dan situasi keuangan. dan sumber jangka panjang dalam laporan saya. Laporan keuangan sering ditulis dengan mempertimbangkan pemangku kepentingan dan semua pengguna sistem keuangan lainnya.

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 adalah: “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk membelikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” Mahmudi (2016) tiga peran utama sistem pengendalian internal adalah pencegahan, deteksi, dan koreksi. Kontrol *detektif*, dan Pengendalian *korektif*.

### **Unsur-unsur SPIP**

Ada lima bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah, yang dituangkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kepala dinas wajib menciptakan dan memelihara sistem pengawasan yang handal mendorong perilaku positif dan mendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di instansi masing-masing di tempat kerja mereka dengan: Menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai etika, dedikasi terhadap kecakapan, memungkinkan pembentukan struktur organisasi kepemimpinan, pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan SDM, pemahaman tentang fungsi pengawas internal.

### **Penilaian Risiko**

Tujuan pengendalian internal adalah untuk memeriksa ancaman eksternal dan internal yang dihadapi oleh berbagai bagian organisasi. Komponen analisis risiko adalah: Proses Mengidentifikasi dan Menilai Risiko.

### **Kegiatan Pengendalian**

Langkah-langkah kontrol membantu dalam memastikan bahwa instruksi yang diberikan oleh pemimpin lembaga diikuti. Pencapaian tujuan organisasi membutuhkan operasi pengendalian yang efisien dan efektif. Ukuran, kompleksitas, dan sifat tanggung jawab dan tugas lembaga pemerintah harus dipertimbangkan ketika menentukan bagaimana operasi pengendalian harus dilakukan oleh pimpinan lembaga. pencatatan transaksi dan peristiwa yang akurat dan cepat, pembatasan akses ke catatan dan sumber daya, akuntabilitas aset, dokumen, dan, dokumentasi sistem pengendalian internal yang baik juga dipelihara untuk transaksi dan kejadian yang signifikan.

### **Transparansi**

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara bebas dan lengkap tentang bagaimana pemerintah diminta pertanggungjawaban untuk menggunakan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan untuk mematuhi peraturan undang-undang inti dari apa yang Nardiawan dalam sjarweni (2015: 28) definisikan sebagai transparansi dalam pengelolaan keuangan. Transparansi adalah gagasan transparansi yang memungkinkan publik untuk mengetahui dan memiliki akses informasi yang paling banyak mengenai pendanaan daerah, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Setiap warga negara harus memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah mereka beroperasi, termasuk kebijakannya, langkah-langkah yang digunakan untuk membuatnya, dan hasil yang mereka hasilkan.

### **Konsep Transparansi**

Gagasan transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk belajar tentang bagaimana pemerintahan mereka dijalankan. Masyarakat memiliki hak untuk menerima informasi atas dasar kebebasan informasi. Mereka yang membutuhkan dapat segera mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum (Miftahudin).

Berbagai metrik, termasuk yang berikut ini, dapat digunakan untuk mengukur keefektifan prinsip transparansi: Mekanisme yang mendukung pertanyaan publik mengenai berbagai kebijakan dan layanan publik, serta prosedur dalam sektor publik, menyediakan sistem transparansi dan standarisasi untuk semua kegiatan pelayanan publik. metode yang memudahkan penyampaian informasi dan penyebarluasannya, serta ketidakkonsistenan cara pegawai negeri menjalankan tugasnya (Mahmudi, 2010).

### **Corona Virus Disease (COVID-19)**

Pada awal tahun 2020, *Corona Virus Disease* 2019 muncul sebagai darurat kesehatan global. Bentuk manusia dari penyakit yang dikenal sebagai Covid-19 belum pernah terlihat sebelumnya.

Setelah kasus Covid terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020, Presiden Republik Indonesia selaku pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta jajarannya berkolaborasi untuk menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghentikan dan memutus mata rantai distribusi.

COVID-19 di masyarakat. diterapkan oleh pemerintah, mulai dari WFH, SD, LSSR, home banting, hingga penerapan perilaku baru berdasarkan protokol kesehatan sesuai standar WHO.. <http://lnkiy.in/WHOCoronaVirus>

Companies that have competence in the fields of marketing, manufacturing and innovation can make its as a source to achieve competitive advantage (Daengs GS, et al. 2020:1419 ).The research design is a plan to determine the resources and data that will be used to be processed in order to answer the research question. (Asep Iwa Soemantri, 2020:5).

Time management skills can facilitate the implementation of the work and plans outlined. (Rina Dewi, et al. 2020:14)Standard of the company demands regarding the results or output produced are intended to develop the company. (Istanti, Enny, 2021:560).

### **METODE PENELITIAN**

Sistem pelaporan, pengendalian internal, dan transparansi pengelolaan dana desa di Kantor Desa Lengkung semuanya ditelaah Selama studi ini. Anda dapat mengajukan studi ini di bawah penelitian kuantitatif deskriptif, yang menggunakan teknik untuk menggambarkan secara faktual dan metodis keadaan yang sebenarnya dalam kaitannya dengan sistem pelaporan, administrasi internal, dan keterbukaan, keuangan daerah lapangan ini terletak di Desa Lengkung. Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang dilakukan penelitian untuk mengetahui dampak sistem pelaporan dan pengendalian intern terhadap transparansi pengelolaan dana desa. Penelitian penulis untuk studi ini akan diserahkan pada Oktober 2022, dan penelitian akan dilakukan antara Oktober 2022 dan Februari 2023. Data yang akurat dan metodis diperlukan untuk interpretasi data yang tepat sehingga temuan dapat secara akurat menggambarkan situasi item yang sedang diselidiki.

Dokumentasi, wawancara, dan angket atau angket adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan dokumen dari sumber sekunder seperti catatan keuangan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Karakteristik Responden

Data primer diperoleh dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner berisi 45 pernyataan kepada aparatur desa dan warga desa untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap Sistem Pelaporan, Pengendalian Intern, dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Jenis Kelamin Responden Jumlah responden laki-laki sebanyak 19 orang (sekitar 63%), sedangkan responden perempuan sebanyak 11 orang (kurang lebih 37%). Usia Responden Diketahui bahwa mayoritas responden berusia di atas 40 tahun dengan jumlah 15 orang atau sekitar 50%. Pendidikan responden mengungkapkan bahwa responden dengan pendidikan SMP – SMA lebih banyak, terhitung sebanyak dua orang atau kurang lebih 80% dari total. Posisi Responden bahwa responden yang melayani atau berstatus penduduk lebih mendominasi yaitu 24 orang atau kurang lebih 80% dari total keseluruhan.

### Data Deskriptif Variabel

Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel Sistem Pelaporan, diketahui bahwa mayoritas responden memberikan penilaian yang baik pada variabel Sistem Pelaporan. Deskriptif Variabel Pengendalian Intern Desa menampilkan tanggapan responden terhadap variabel pengendalian intern. Sebagian besar responden, diketahui, memberikan pendapat yang baik tentang faktor pengendalian internal. Transparansi Variabel Deskriptif dalam Pengelolaan Dana Desa. Ketika jawaban atas variabel transparansi dalam pengelolaan dana desa ditunjukkan, terlihat bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap tindakan pengendalian internal.

### Metode Successive Interval (MSI)

Berdasarkan Hasil uji MSI ada banyak variabel studi, dan hubungan antara indikator dan skor konstruk secara keseluruhan signifikan secara statistik. memiliki  $r_{hitung} > r_{tabel} = 0,248$  maka dapat diketahui hasil tiap-tiap item  $> 0,248$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item yang digunakan untuk menilai variabel penelitian di Kantor Desa Lengkong sah digunakan dalam penelitian atau pernyataan yang disampaikan.

### Hasil Uji Realibilitas

Tabel 1

#### Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	R tabel	Keterangan
Sistem Pelaporan	0,830	0,248	Realibel
Pengendalian Internal	0,935	0,248	Realibel
Transparansi Pengelolaan Dana Desa	0,935	0,248	Realibel

Sumber: Output data SPSS, tahun 2023

Berdasarkan tabel 1 Hasil uji Realibilitas tersebut menunjukkan hasil yang berbeda, dan variabel tersebut menghasilkan *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari  $r_{tabel}$  sebesar 0,248, sehingga semua variabel dianggap dapat dipercaya karena memiliki koefisien reliabilitas di atas ambang batas 0,05, dan agar data yang terkandung dalam masing-masing variabel tersebut dapat digunakan sebagai indikator yang bermakna.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1. Hasil Uji Normalitas Data

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	
N		30	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	3,64955889	
Most Extreme Differences	Absolute	,101	
	Positive	,072	
	Negative	-,101	
Test Statistic		,101	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	,591	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,579
		Upper Bound	,604

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 d. This is a lower bound of the true significance.  
 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Output data SPSS 2023

**Gambar 1 Hasil Uji Normalitas**

Menurut gambar 1 Diatas, hasil uji kolmogrov-smimow, dari 45 Data nilai Asymp ditampilkan. Karena tingkat signifikansi (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka data dalam model regresi ini terdistribusi secara teratur.

### 2. Hasil Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,115	3,810		-,818	,421		
	x1	,122	,233	,082	,524	,605	,399	2,506
	x2	,385	,076	,794	5,096	<,001	,399	2,506

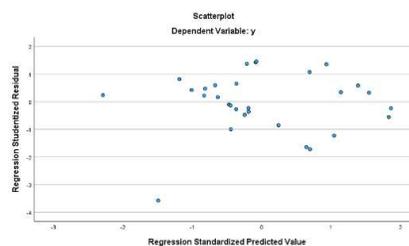
a. Dependent Variable: y

Sumber : Output data SPSS 2023

**Gambar 2 Hasil Uji Multikoloniearitas**

Berdasarkan gambar 2 diatas, hasil uji multikoloniearitas nilai menurut perhitungan VIF, tidak ada variabel dengan nilai lebih rendah dari 10. Hasilnya bisa dikatakan bahwa hal ini tidak terjadi dalam penelitia multikoloniearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output data SPSS 2023

**Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Titik-titik dalam grafik scatterplot berikut terdistribusi secara acak, dengan beberapa berada di atas 0 (nol) pada sumbu Y sementara yang lain berada di bawahnya. Dapat dinyatakan bahwa model regresi yang digunakan tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas..

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,115	3,810		-.818	,421		
	x1	,122	,233	,082	,524	,605	,399	2,506
	x2	,385	,076	,794	5,096	<,001	,399	2,506

a. Dependent Variable: y

Sumber: Output data SPSS, tahun 2023

**Gambar 4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Berdasarkan gambar 4 Koefisien yang tidak standar dari analisis regresi linier berganda yang dibahas di atas dapat digunakan untuk membuat model persamaan linier berganda yang menggambarkan pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linier berganda berikut dihitung dengan regresi linier berganda dengan menggunakan program komputer SPSS versi 29.0:

$$Y = -3,115 + 122X1 + 0,385X2 + e$$

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa dengan asumsi tidak ada faktor lain yang berperan, koefisien konstanta positif menunjukkan hal itu sistem pelaporan, pengendalian internal dan transparansi maka, alokasi dana desa cenderung mengalami penurunan. (1 )diasumsikan Jika sistem pelaporan telah diperbaiki, maka penduduk desa dapat mengharapkan bagian anggaran yang lebih besar jika tidak ada perubahan tambahan.

(2) Variabel pengendalian intern memiliki koefisien regresi positif, menunjukkan bahwa, mengendalikan faktor lain, tingkat pengendalian intern yang lebih tinggi dikaitkan dengan distribusi uang desa yang lebih murah hati.

**Hasil Uji Hipotesis**

**1. Hasil Uji T**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,115	3,810		-.818	,421		
	x1	,122	,233	,082	,524	,605	,399	2,506
	x2	,385	,076	,794	5,096	<,001	,399	2,506

a. Dependent Variable: y

Sumber : Output data SPSS 2023

**Gambar 5 Hasil Uji T**

Nilai koefisien regresi untuk variabel sistem pelaporan sebesar 0,122 dengan signifikansi sebesar 0,605 berdasarkan temuan uji t pada Gambar 5 di atas. Hasil pengujian hipotesis ditolak karena nilai signifikan lebih dari 0,05 dan menunjukkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh berarti terhadap transparansi pengelolaan dana desa dengan arah koefisien regresi negatif. Dengan demikian, tidak terlihat dampak mekanisme pelaporan (X1) terhadap keterbukaan pengelolaan dana desa (Y).

Sedangkan nilai koefisien regresi variabel pengendalian intern sebesar 0,385 dan tingkat signifikansinya 0,001, Nilai p kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara pengendalian internal dan transparansi pengelolaan dana desa dengan arah koefisien regresi positif, mendukung hipotesis. menunjukkan bahwa pengendalian internal (X2) secara signifikan meningkatkan transparansi (Y) pengelolaan dana desa.

## 2. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1089,241	2	544,620	38,070	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	386,259	27	14,306		
	Total	1475,500	29			

a. Dependent Variable: y  
b. Predictors: (Constant), x2, x1

Sumber: Output data SPSS, tahun 2023

### Gambar 6 Hasil Uji F

Berdasarkan hasil uji simulasi data di gambar 6 di atas diketahui  $f_{hitung}$  sebesar 38.070 memiliki nilai 0,001 membuat perbedaan. Koefisien regresi sistem pelaporan dan pengendalian internal keduanya berdampak pada penyelenggaraan alokasi dana desa, karena p-value lebih dari 0,05..

## 3. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,859 <sup>a</sup>	,738	,719	3,78231

a. Predictors: (Constant), x2, x1  
b. Dependent Variable: y

Sumber : Output data SPSS 2023

### Gambar 7 Hasil Uji Koefisien Determinan

Berdasarkan pada gambar 7 hasil perhitungan koefisien determinan di atas diperoleh nilai koefisien determinan sebesar 0,859 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara sistem pelaporan dan pengendalian intern terhadap transparansi pengelolaan dana desa dengan korelasi sebesar 85,9%, sedangkan sisanya sebesar 14,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

Konsekuensinya, nilai koefisien determinan sebesar 0,738 menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan (X1) dan pengendalian intern (X2) memberikan kontribusi sebesar 73,8% terhadap variabel transparansi pengelolaan data desa (Y). Sisanya sebesar 72,1% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diperhitungkan dalam analisis ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh sistem pelaporan terhadap transparansi pengelolaan dana desa

Sistem Pelaporan terbukti berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap transparansi pengelolaan dana desa di Desa Lengkong, dengan didapatkan hasil uji t sebesar 0,112 dan sig. 0,605 >  $\alpha$  = 0,05. Hal tersebut merupakan faktor penentu terhadap sistem pelaporan. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa masyarakat sudah merasa percaya bahwa peristiwa naas akan dihindari dan dapat di minimalisir oleh pihak desa sendiri sehingga dapat mempengaruhi kepuasan akan sistem pelaporan.

### **Pengaruh Pengendalian Internal secara parsial Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

Pengendalian Internal terbukti berdampak positif dan substansial terhadap keterbukaan pengelolaan dana desa di Desa Lengkong, dengan didapatkan hasil uji t sebesar 0,385 dan sig.  $0,001 < \alpha = 0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal memberikan kepastian yang wajar tentang keakuratan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap aturan dan hukum, serta efisiensi dan fungsionalitas sistem kontrol internal telah berjalan sebagaimana mestinya..

#### **Anggaran APBDes Lengkong**

Pendapatan APBDES 2021-2022			
No.	Sumber	2021	2022
1	Dana Desa	1.091.897.000	1.073.869.800
2	Bagi Hasil Pajak Restribusi	150.661.300	272.003.500
3	Alokasi Dana Desa	895.246.200	985.823.600
4	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000	130.000.000
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	64.814.800	-
6	Pendapatan Asli Desa	60.000.000	40.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>2.392.619.300</b>	<b>2.501.696.900</b>

*Sumber : Data APBDeS Lengkong*

Dilihat dari penjabaran di atas terjadi peningkatan di setiap indikator dikarenakan adanya perubahan keputusan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengeluarkan Keputusan Nomor 82 Tahun 2022 berjudul “Pedoman Ketahanan Pangan di Desa”. Tanggal 11 Juli 2022, Kepmendes ini isinya sebagai berikut: tujuan agar setiap orang di desa memiliki akses pangan yang cukup, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tidak ada kerawanan pangan di desa, dan bahwa dana kota dapat digunakan untuk ketahanan pangan dan ternak. Peraturan Menteri tentang Ketahanan Pangan di Desa (PDTT No. 82 Tahun 2022) dilengkapi lampiran dengan pedoman ketahanan pangan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai panduan, masyarakat pedesaan dapat memastikan akses mereka ke makanan yang sehat dan terjangkau dengan lebih baik. Kebijakan dan indikator ketahanan pangan desa, program ketahanan pangan desa, dan tugas kelembagaan ketahanan pangan desa semuanya tercakup.

#### **Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid'19 di Desa Lengkong Kabupaten Bandung**

Rilis Perppu No. 1/2020 menawarkan metode baru untuk mengurangi kerusakan ekonomi kota akibat epidemi Covid-19. Menurut Pasal 2 Ayat 1 huruf (i) Perpres tersebut, penggunaan alokasi anggaran memprioritaskan tugas-tugas tertentu (refocusing), mengubah alokasi, dan/atau memperlambat atau menghentikan distribusi transfer anggaran ke daerah dan anggaran desa, semuanya diperlukan, sesuai dengan kondisi yang ditetapkan.. Perwakilan desa atau perwakilan yang berpotensi memberikan pengaruh baik bagi masyarakat desa menawarkan transparansi dalam penanganan uang masyarakat. Berdasarkan falsafah Kristiani dalam ( Covid-19 di Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah berjalan efektif. Ketersediaan dan keterjangkauan dokumentasi, akurasi informasi dan ketelitian, transparansi prosedural, dan peraturan semuanya telah dipertimbangkan.

## KESIMPULAN

Hasil dari uji hipotesis digunakan untuk menarik kesimpulan.:

1. Sistem pelaporan desa dan pengendalian intern memiliki pengaruh gabungan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa Lengkong.
2. Di daerah Lengkong, Sistem Pelaporan Desa kurang berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan anggaran daerah.
3. Pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa Desa Lengkong.

Lebih lanjut, kendala penelitian ini mencegahnya menjadi sempurna, dan mereka adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini tidak memiliki kelompok pembanding karena hanya menggunakan sampel dari satu komunitas..
2. Pihak desa hanya memberikan Laporan APBDes tahun 2021-2022 saja, sehingga tidak mendapat rincian-rincian lainnya.
3. Kurangnya antusias masyarakat dan pihak desa untuk membantu mengisi kuesioner yang telah dibagikan sehingga sedikit menghambat dalam pengerjaan.
4. Kurangnya informan, terutama dari masyarakat, dalam wawancara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhamad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Jakarta : Salemba Empat
- [BPKD] Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2020. Kabupaten Bandung.
- [BPKP] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2020. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Bandung dalam Angka 2020. BPS Kabupaten Bandung
- Bastian dan Indra, (2015). Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga
- Cholid Nabuko, Abu Achmadi, (2015). Metode Penelitian. Jakarta, penerbit Bumi Aksara
- Daengs, G. S. A., Istanti, E., Negoro, R.
- M. B. K., & Sanusi, R. (2020). The Aftermath of Management Action on Competitive Advantage Through Process Attributes at Food and Beverage Industries Export Import in Perak Harbor of Surabaya. *International Journal Of Criminology and Sociologi*, 9, 1418–1425
- Devi Pertiwi A.P, Tituk Diah W, (2022). The Influence of Internal Control System, Competence and Transparacy on Village Fund Management Accountability in Rungkut District, Surabaya City. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (ijebar)*, Vol-6, Issue-4, 2022.
- Dr. Ratna Wijayanti, Noviansyah R, Riza Bahtiar S, (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Edisi 3. Jawa Timur :Penerbit Widya Gama Press.
- Djaali (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta:Bumi Aksara.
- Enny Istanti1), Bramastyo Kusumo2), I.
- N.(2020).IMPLEMENTASI HARGA,KUALITAS PELAYANAN DAN PEMBELIAN BERULANG PADA PENJUALAN PRODUK GAMIS AFIFATHIN. *Ekonomika 45*, 8(1), 1–10

- Eko Febri Lusiono, Suharman, (2017). Analisis Penerimaan Aplikasi SISKEUDES di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 5 No. 2.
- Fitri Sukmawati, (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*, Volume. 2, No.1, Juni 2019.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang : BPFE Universitas Diponegoro.
- I Made Y. Ni Ketut P, (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.28.1.Juli (2019): 132-158.
- Ihasnuddin,( 2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia, *Kompas.com*.
- Iwa Soemantri, Asep et al. 2020.  
Entrepreneurship Orientation Strategy, Market Orientation And Its Effect On Business Performance In MSMEs. *Jurnal EKSPEKTRA Unitomo* Vol. IV No. 1, Hal. 1-10
- Jehan M. Malahika , Herman K , Rudy J. Pusung (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara), *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 578-583.
- Juliandi A, Irfan, Manurung S. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi. Medan: UMSU Press.
- J. M. Malahika, Herman K, Rudy, J, P (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 578-583.
- Mufti Arief A, (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 3 No. 1, Januari-Mei 2020.
- Oktaviani Rita Puspasari, Dendi Purnama (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 2, No 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018
- Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 mengenai sistem pengendalian intern pemerintah
- Rina Dewi, et al. 2020. Internal Factor  
Effects In Forming The Success Of Small Businesses. *Jurnal SINERGI UNITOMO*, Vol. 10 No. 1, Hal. 13-21.
- Rizki W, Henny Zainal, Wahyuddin H, (2021). The Influence of the Village Financial System Application on the Performance of the Lempangan Village Government. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Vol. 15, No. 1, July 2021.
- Sarosa, Samiaji, (2012). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Indeks.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 Tahun 2010 tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan

- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian. Bandung : ALFABETA
- Sulistiyowati, Norita Citra Y, Elok F (2019) Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. International Journal of Social Science and Business, Vol, 2 No. 3.
- Umi Narimawati, (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Teori dan Aplikasi. Bandung Agung Media.
- Vullaela Y, Arif H, Iin W. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management, Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022,
- Widiarto, M, Sarjan, Harianto, (2021). Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa Berbasis web. Journal Pengurang: Conference Series, Vol. 3 No. 1 Mei 2021
- Wiratna Sujarweni, (2015). Akuntansi Desa. Jakarta, Penerbit Pustaka Baru
- Yessy Dessy K. Martini Simbel, (2021). The effect of the government internal control system (SPIP) on the planning and implementation of the village fund budget in Mentaya Hulu District, Kota waringin Timur Regency. Journal of Environment and Management, 2(2), 148-158.
- Yusuf M, (2018). Pengaruh Penggunaan Media Boneka Tangan Terhadap Hasil Belajar Menyimak Dogeng Siswa Kelas II SDN 88 Longrong Kabupaten Soppeng. Universitas Muhammadiyah Makasar.